



**CIPS**

Center for Indonesian  
Policy Studies

**Cedera dan Kematian akibat  
Minuman Beralkohol Palsu dan Oplosan**

# Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol di Indonesia

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)



# **Cedera dan Kematian akibat Minuman Beralkohol Palsu dan Oplosan - Potensi Dampak Pelarangan Minuman Beralkohol di Indonesia**

**Penulis:**

Rofi Uddarojat

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)

**Jakarta, Indonesia**

**Maret 2016**

Hak Cipta © 2016 oleh Center for Indonesian Policy Studies



---

## Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi Kebijakan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan melarang produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol dengan kandungan 1% hingga 55% kadar alkohol. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kajian yang menyeluruh mengenai dampak buruk minuman beralkohol di Indonesia. Tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia cukup rendah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Hanya sekitar 500.000 masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol dan sebagian besar merupakan jenis minuman keras (*hard liquor*).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai macam kebijakan untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Bea cukai pun sudah ditetapkan untuk meningkatkan harga penjualan. Pembatasan investasi asing juga telah meningkatkan harga minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi. Bir dan anggur fermentasi (*wine*) sulit diakses karena adanya larangan penjualan di toko-toko kecil dan minimarket. Sejumlah pemerintahan daerah pun telah menerapkan larangan penjualan minuman beralkohol dalam yurisdiksi mereka melalui peraturan daerah (*perda*).

Akibat mahal dan sulitnya mendapatkan minuman beralkohol, masyarakat Indonesia mengonsumsi jenis minuman beralkohol yang tidak tercatat (*unrecorded alcohol*) 5 kali lebih banyak dari minuman beralkohol yang diperjualbelikan dengan legal. Minuman beralkohol yang tidak tercatat seringkali mengandung kadar metanol yang sangat beracun dan menyebabkan kejang-kejang, kegagalan organ, dan kematian. Banyaknya kasus minuman beralkohol palsu dan oplosan yang dilaporkan dari seluruh penjuru Indonesia menunjukkan bahwa pembatasan penjualan minuman beralkohol menyebabkan peningkatan permintaan terhadap minuman beralkohol palsu dan oplosan sebagai substitusi minuman beralkohol legal yang sulit diakses.

Riset ini membuktikan bahwa masih banyak data yang perlu dikumpulkan dan dianalisis sebelum undang-undang yang akan mengatur produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol ini diberlakukan. Data yang sudah ada memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tingkat konsumsi minuman beralkohol yang diperjualbelikan secara legal. Pemerintah Indonesia sepatutnya lebih fokus pada upaya mengurangi produksi, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol palsu dan oplosan di Indonesia.

Rencana Pelarangan atas minuman beralkohol legal yang kini sedang dibahas berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Pelarangan ini akan mendorong distribusi minuman beralkohol melalui pasar gelap yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah dan memberikan dampak negatif terhadap keamanan publik. Hal ini pun akan, secara tidak adil, berdampak pada keluarga berpenghasilan rendah karena masyarakat kelas menengah ke atas dapat tetap mengakses penjual resmi di tempat tujuan wisata, restoran dan hotel-hotel mewah.

## 1 Pendahuluan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah memulai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang bertujuan untuk melarang produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol yang mengandung kadar alkohol 1% hingga 55%<sup>1</sup>.

Dalam versi terbarunya, RUU ini memberi sanksi bagi konsumen minuman beralkohol dengan hukuman tiga bulan hingga dua tahun penjara atau denda sebesar Rp 10-50 juta (setara dengan US\$746-3,728). RUU ini memberi pengecualian kepada konsumsi alkohol dalam jumlah terbatas untuk kegunaan kegiatan adat, keagamaan, dan aktivitas medis dan di dalam area pariwisata serta lokasi-lokasi yang sudah ditentukan<sup>2</sup>.

Pelarangan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol. Akan tetapi, data yang tidak akurat tentang dampak buruk konsumsi minuman beralkohol tidak dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei-survei lain yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan hanya mampu mengukur konsumsi minuman beralkohol. Sampai saat ini belum ada kajian yang menyeluruh untuk mengetahui dampak buruk minuman beralkohol. Angka 18.000 korban jiwa akibat minuman beralkohol yang disebutkan oleh para pendukung pelarangan<sup>3</sup> belum dapat dipastikan validitasnya karena tidak adanya statistik yang mengidentifikasi secara jelas sebab-sebab kematiannya. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) membenarkan bahwa kecelakaan yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol tidak dicatat secara spesifik dan hanya dikategorisasikan sebagai kecelakaan karena kecerobohan mengemudi<sup>4</sup>.

## 2 Konsumsi Minuman beralkohol di Indonesia

Tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia tampak rendah apabila dibandingkan dengan konsumsi jenis minuman lain dan konsumsi minuman beralkohol di negara-negara lain.

Survei Kementerian Kesehatan di tahun 2014 menemukan bahwa hanya ada sekitar 500.000 penduduk Indonesia, atau sekitar 0.2 persen dari keseluruhan populasi Indonesia, yang mengonsumsi minuman beralkohol (lihat bagan 1)<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 mengatur minuman beralkohol di Indonesia ke dalam tiga kategori, kategori "A" untuk yang mengandung <5% etanol, kategori "B" untuk yang mengandung 5-20% etanol, kategori "C" untuk yang mengandung >20% etanol. Kementerian Agama, *Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol* <http://kemenag.go.id/file/file/ProdukHukum/qanu1395037364.pdf> diunduh pada 29/02/16 10:18

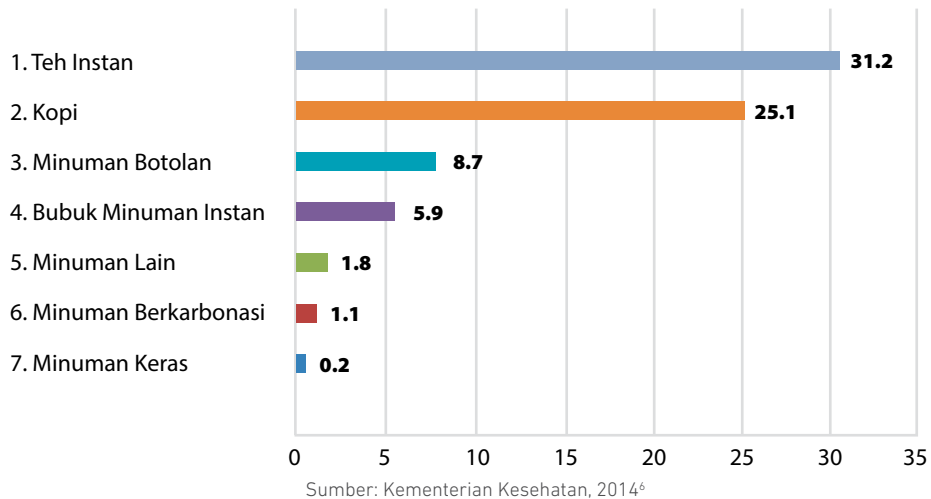
<sup>2</sup> RUU ini diinisiasi oleh dua partai Islam pada tahun 2014 dan diharapkan agar dapat sah menjadi UU pada akhir tahun 2016. Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat RI, *Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol*, <http://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20150626-022127-5059.pdf> diunduh pada 17/06/2016 11:34

<sup>3</sup> Salah satu pemrakarsa RUU ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa 18.000 korban tewas setiap tahunnya akibat dari konsumsi minuman beralkohol. Tama Salim dan Dylan Amirio, *House talks Alcohol Control* <http://www.thejakartapost.com/news/2015/07/04/house-talks-alcohol-control.html> diunduh pada 17/06/2016 11:35

<sup>4</sup> Kompas, *Polisi Belum Punya Data Kecelakaan Yang Dipicu Alkohol* <http://print.kompas.com/baca/2016/02/10/Polisi-Belum-Punya-Data-Kecelakaan-yang-Dipicu-Alk> diunduh pada 29/02/16 10:18

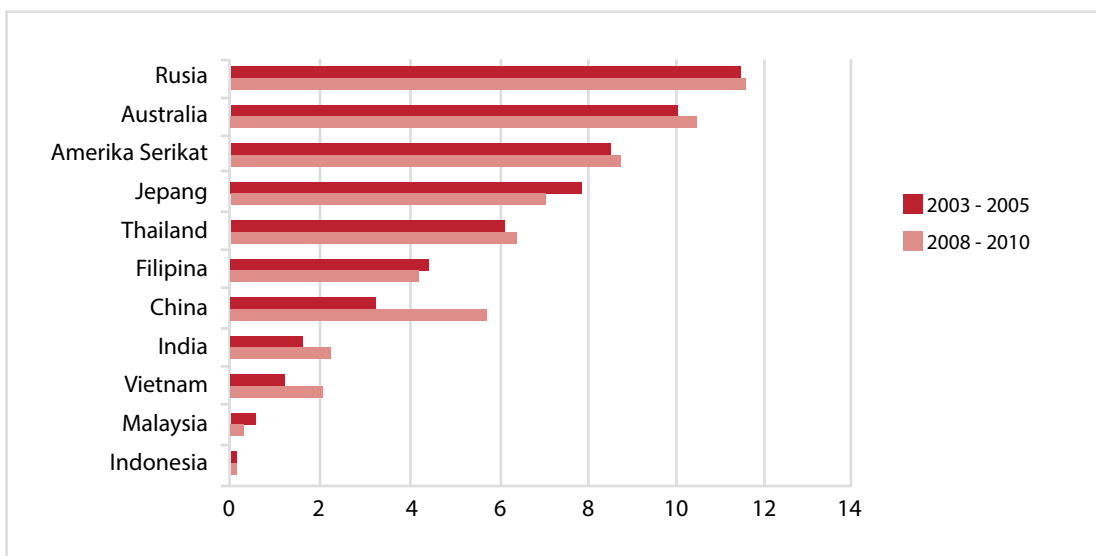
<sup>5</sup> Kementerian Kesehatan, *Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu 2014*, <http://jiiks.litbang.depkes.go.id/buku/studi-diet-total-survei-makanan-individu-indonesia-2014/> diunduh pada 29/02/16 17:57

**Bagan 1**  
Proporsi Populasi Indonesia yang Mengonsumsi Produk-Produk Minuman (dalam %)



Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah konsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia relatif lebih rendah. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan jumlah konsumsi per kapita minuman beralkohol di Indonesia adalah sebesar 0,1 liter yang berasal dari minuman beralkohol yang diproduksi dan diperdagangkan secara legal. Tingkat konsumsi ini jauh lebih rendah dari Thailand, Filipina, Vietnam atau Malaysia (lihat Bagan 2).

**Bagan 2**  
Perbandingan Konsumsi Minuman beralkohol Legal di Indonesia antara Dua Periode (dalam liter per kapita per tahun)



Sumber: World Health Organization, 2014<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ibid.

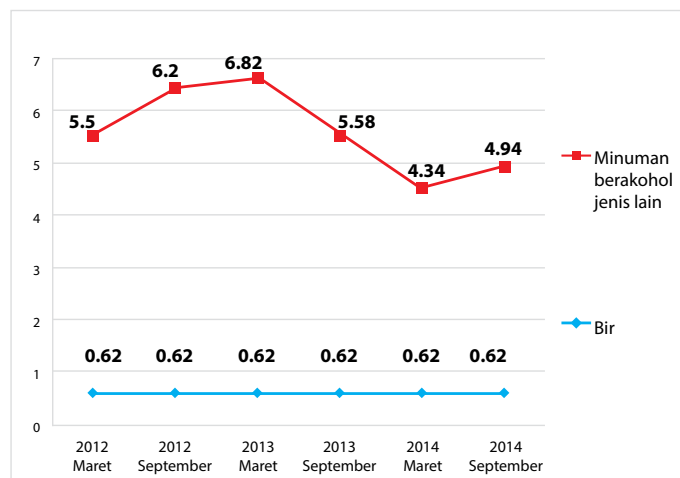
<sup>7</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health 2014*, [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/) retrieved on 17/06/2016 13:20

Jumlah konsumsi minuman beralkohol di Indonesia yang relatif rendah dan tidak tersedianya data mengenai risiko kesehatan dan keamanan publik yang terkait dengan minuman beralkohol tidak dapat menjadi dasar pembuatan kebijakan larangan minuman beralkohol.<sup>8</sup>

Selain itu, menurut WHO, masyarakat Indonesia cenderung rentan terhadap gaya minum episodik secara berlebihan (Heavy Episodic Drinking). Ini artinya, lebih dari 30% masyarakat Indonesia yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja melakukan hal tersebut dengan niat untuk mabuk dalam jangka waktu yang singkat.<sup>9</sup> Masyarakat Indonesia memang hanya mengonsumsi minuman beralkohol dalam jumlah rendah, namun mereka yang mengonsumsi minuman beralkohol sengaja mengonsumsi dalam jumlah yang banyak dan waktu yang singkat.

Meskipun begitu, hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sebagian besar minuman beralkohol yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia merupakan minuman yang termasuk dalam kategori C minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi, yaitu sebesar 20% hingga 55%. Survei rumah tangga yang dilaksanakan oleh BPS menemukan bahwa konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi berjumlah 5 kali lebih banyak dari konsumsi minuman beralkohol dengan kadar alkohol rendah seperti bir dan anggur fermentasi (lihat Bagan 3).<sup>10</sup>

**Bagan 3**  
Konsumsi Minuman beralkohol Berdasarkan Jenis (dalam ml/minggu)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2012-2014<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) dan WHO menerapkan metodologi penelitian yang berbeda dan sampai pada perkiraan konsumsi total minuman beralkohol yang berbeda pula. BPS melakukan survei sosial ekonomi nasional (susenas) per empat bulan dan melaporkan bahwa pada tahun 2012-2014 konsumsi minuman beralkohol di Indonesia mencapai rata-rata 5.56 ml/minggu. Angka ini mencakup konsumsi minuman beralkohol baik yang legal maupun ilegal. Sementara itu, WHO mengumpulkan data melalui badan PBB, Food and Agriculture Organization (FAO), dan melalui perusahaan riset pasar seperti Canadean dan IWSR. WHO melaporkan bahwa konsumsi tahunan di tahun 2014 mencapai 0.6 liter, atau yang setara dengan 11.6 ml/minggu. Perkiraan WHO ini terdiri dari konsumsi minuman beralkohol legal sebanyak 0.1 liter dan minuman beralkohol ilegal sebanyak 0.5 liter. Konsumsi minuman beralkohol ilegal termasuk melalui pembelian lintas perbatasan, konsumsi minuman pengganti, minuman beralkohol produksi rumahan baik yang legal maupun ilegal, penyelundupan dan sebagainya. World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health 2014: Statistical annexes, Methodology, and references*, [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/msb\\_gsr\\_2014\\_3.pdf?ua=1](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/msb_gsr_2014_3.pdf?ua=1) diunduh pada 17/06/2016 16:14; Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia BPS <http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/986> diunduh pada 17/06/2016 14:47

<sup>9</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health 2014*, [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/) diunduh pada 17/06/2016 13:20

<sup>10</sup> Survei BPS sebenarnya mencatat jumlah konsumsi anggur fermentasi sebesar 0.000 ml di Indonesia. Badan Pusat Statistik, *Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia 2012-2014*, <http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/986> diunduh pada 17/06/2016 14:47; use, illegal and legal home production, smuggling)

<sup>11</sup> Ibid.



### 3 Kebijakan yang mengatur konsumsi minuman beralkohol oleh Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia sejak lama telah berusaha menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Empat kebijakan utama yang ditempuh dipaparkan di bawah ini:

Pertama, Pemerintah telah menerapkan pajak bea cukai yang tinggi terhadap minuman beralkohol.

Pada tahun 2015, pemerintah menaikkan tarif impor minuman beralkohol kategori B dan C menjadi 150% dari nilai barang yang diimpor.<sup>12</sup>

Pajak cukai minuman beralkohol juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tahun 2010, pajak cukai terhadap minuman beralkohol yang diproduksi di dalam negeri dinaikkan hingga 380% untuk kategori A, 500% untuk kategori B, dan 188% untuk kategori C. Pada tahun 2014, pajak ini kembali mengalami peningkatan sebesar 11.6% untuk semua kategori. Walaupun pajak cukai untuk konsumsi minuman beralkohol impor tidak mengalami kenaikan sebesar minuman beralkohol domestik, pajak cukai minuman beralkohol impor tetap lebih tinggi dari minuman beralkohol domestik.<sup>13</sup> Pajak cukai minuman beralkohol domestik dalam kategori A meningkat dari Rp2.500,- (2010) ke Rp11.000,- (2010) dan Rp13.000,- (2014) per liter (lihat Tabel 1).<sup>14</sup>

**Table 1**  
Alcoholic Beverages Excise Tax 2016

Kategori	Level	Pajak/Liter (dalam Rupiah)	
		Domestik	Impor
A	< 5%	13,000	13,000
B	5% < 20%	33,000	44,000
C	> 20%	80,000	139,000

Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan<sup>15</sup>

Kedua, pemerintah Indonesia secara berkala memperbarui daftar bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal asing atau terbuka dengan persyaratan tertentu (Daftar Negatif Investasi/DNI). DNI sejak bulan April tahun 2014 melarang adanya investasi asing langsung dalam perusahaan yang memproduksi minuman beralkohol di Indonesia.<sup>16</sup>

Ketiga, terdapat larangan yang berlaku untuk penjualan minuman beralkohol di minimarket. Walaupun data menunjukkan tingkat konsumsi minuman beralkohol kategori A yang sangat rendah, sejak tahun 2015 Kementerian Perdagangan melarang penjualan bir pada 16.000 minimarket dan 55.000 toko kecil lainnya. Larangan parsial ini bertujuan untuk mencegah konsumsi minuman beralkohol oleh anak di bawah umur dan membuat minuman beralkohol yang diproduksi secara

<sup>12</sup> Menurut Peraturan Menteri No. 132 / 2015

<sup>13</sup> Menurut Peraturan Menteri No. 26 / 2010 <http://peraturan.bcperak.net/sites/default/files/peraturan/2010/62pmk0112010.pdf>

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Menkeu Tetapkan Kebijakan Tarif Cukai MMEA Tahun 2014, <http://www.kemenkeu.go.id/Berita/menkeu-tetapkan-kebijakan-tarif-cukai-mmea-tahun-2014> diunduh pada 29/02/2016 16:00

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 membatasi investasi asing dalam pendirian atau ekspansi bisnis dalam berbagai sektor. Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, <http://www.ina.or.id/images/stories/download/Investment-Negative-List-Reg-39-2014.pdf> diunduh pada 29/02/2016 14:12

legal lebih sulit diakses oleh masyarakat. Perusahaan bir domestik telah melaporkan penurunan jumlah penjualan secara signifikan dari minuman beralkohol legal yang mereka produksi.<sup>17</sup>

Keempat, sejumlah pemerintahan daerah telah menerapkan pelarangan minuman beralkohol dalam yurisdiksi mereka. Sejak awal era demokrasi dan desentralisasi pada tahun 1998, banyak daerah di Indonesia mulai menerapkan peraturan daerah yang melarang minuman beralkohol. Kota Depok yang memiliki populasi sekitar 1.8 juta jiwa, terletak di provinsi Jawa Barat dan berbatasan dengan Jakarta Selatan, merupakan salah satu daerah yang melarang minuman beralkohol. Di bawah kepemimpinan Walikota Nur Mahmudi Ismail dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), pemerintah Depok melarang penjualan minuman beralkohol di tahun 2008. Semenjak 2008, Depok menjadi salah satu daerah yang kering minuman beralkohol di Indonesia.<sup>18</sup>

### Cerita dari Depok

Idi Depok, masyarakat bisa membeli minuman beralkohol produksi rumahan seharga Rp25.000,- atau kurang dari US\$2, untuk botol ukuran 620ml yang diakses melalui toko-toko kecil. Pada bulan Desember 2015, minuman beralkohol jenis ini membunuh 5 orang. Para korban merasa mual dan mulai muntah-muntah. Kemudian, mereka kehilangan penglihatan dan mengalami kerusakan otak dan kegagalan organ sebelum akhirnya mereka meninggal dunia. Menurut laporan berita, Bapak Syamsudin, seorang warga setempat, menyaksikan penderitaan para korban saat dia dimintai tolong oleh beberapa wanita yang para suaminya dalam keadaan kritis.

Bapak Syamsudin menyaksikan bagaimana para korban merasakan rasa sakit yang membakar di seluruh tubuh mereka dan bagaimana mereka mendadak kehilangan penglihatan dan menjadi buta. Mereka meninggal dunia tanpa sempat mendapatkan perawatan medis, hanya beberapa jam setelahnya.<sup>19</sup>

Setelah polisi menggerebek toko yang menjual minuman beralkohol mematikan di Depok tersebut, mereka menemukan beberapa zat beracun. Secara umum, minuman beralkohol ilegal mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan beracun. Bahan-bahan yang biasa digunakan untuk menggantikan etanol, yang merupakan komponen utama dalam minuman beralkohol legal, termasuk metanol, racun anti serangga, pemanis dan lain sebagainya.

Korban jiwa di Depok merupakan salah satu contoh dari ratusan masyarakat Indonesia yang meninggal setiap tahunnya akibat dari minuman beralkohol yang diproduksi secara ilegal. Produsen dan penjual berskala kecil membuat minuman beralkohol jenis ini tersedia di seluruh pelosok Indonesia. Dengan menggunakan bahan kimia yang lebih murah dari etanol, mereka telah menyebabkan risiko kematian bagi para konsumennya.

<sup>17</sup> Penjualan PT Multi Bintang dan PT Delta Djakarta, dua produsen bir lokal terbesar menurun pada tahun 2015 setelah Kementerian Perdagangan melarang penjualan bir di toko kecil dan minimarket. Pendapatan penjualan PT Delta Djakarta menurun sebesar 25.5% dari tahun sebelumnya sedangkan pendapatan penjualan PT Multi Bintang menurun sebesar 9,8%. PT Delta Jakarta, *Laporan Tahunan 2015: Beyond Brewing*, [http://www.deltajkt.co.id/web/images/Report/ANNUAL\\_REPORT\\_2015\\_PT\\_DELTA\\_DJAKARTA\\_Tbk.pdf](http://www.deltajkt.co.id/web/images/Report/ANNUAL_REPORT_2015_PT_DELTA_DJAKARTA_Tbk.pdf) diunduh pada 17/06/2016 20:11 and PT Multi Bintang, *Laporan Tahunan 2015: Agility to Win*, file:///D:/mbi-ar15.pdf diunduh pada 17/06/2016 20:15

<sup>18</sup> Depok menghentikan penjualan minuman beralkohol di tahun 2008 melalui peraturan daerah No. 6 Tahun 2008. Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008* [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA\\_DEPOK\\_06\\_2008.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_DEPOK_06_2008.pdf) diunduh pada 17/06/2016 20:28

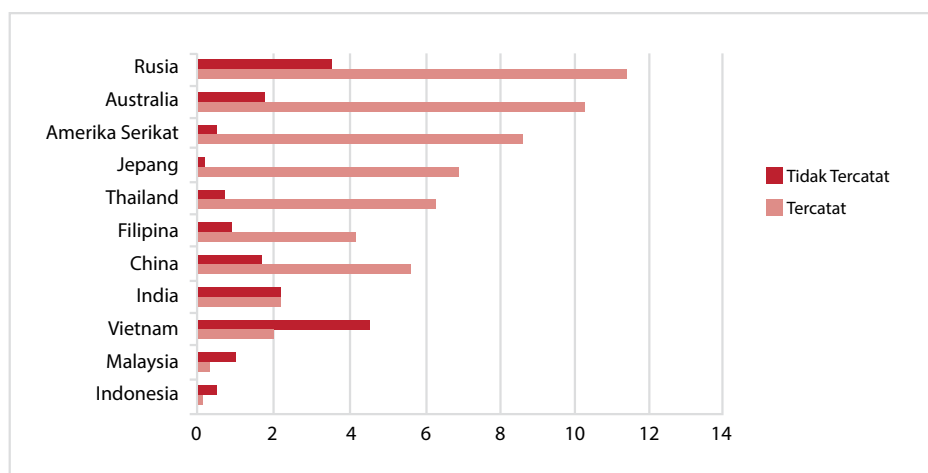
<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Syamsudin pada tanggal 28 Januari 2016.

#### 4 Konsumsi Minuman beralkohol tidak tercatat

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa Indonesia mengonsumsi lima kali lebih banyak minuman beralkohol tidak tercatat dari minuman beralkohol yang dibeli secara legal di vendor yang memiliki lisensi penjualan.<sup>20</sup> Antara tahun 2008 dan 2010, konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat (unrecorded alcohol consumption) di Indonesia mencapai 0.5 liter per kapita sementara konsumsi minuman beralkohol yang diperdagangkan secara legal tetap di titik 0.1 liter per kapita (Bagan 4).

**Bagan 4**

Perbandingan konsumsi minuman beralkohol yang tercatat dan yang tidak tercatat di Indonesia (2008-2010) (dalam liter per kapita per tahun)



Sumber: Laporan Minuman beralkohol WHO, 2014<sup>21</sup>

Sangat sulit untuk memastikan jenis minuman beralkohol dalam kategori yang tidak tercatat tanpa adanya data yang mencukupi. Beberapa merek asing berhasil diselundupkan ke Indonesia, ada pula minuman tradisional dan “jamu” yang diproduksi dalam negeri oleh kelompok etnis Indonesia, dan ada juga minuman oplosan yang dijual oleh pedagang kaki lima.

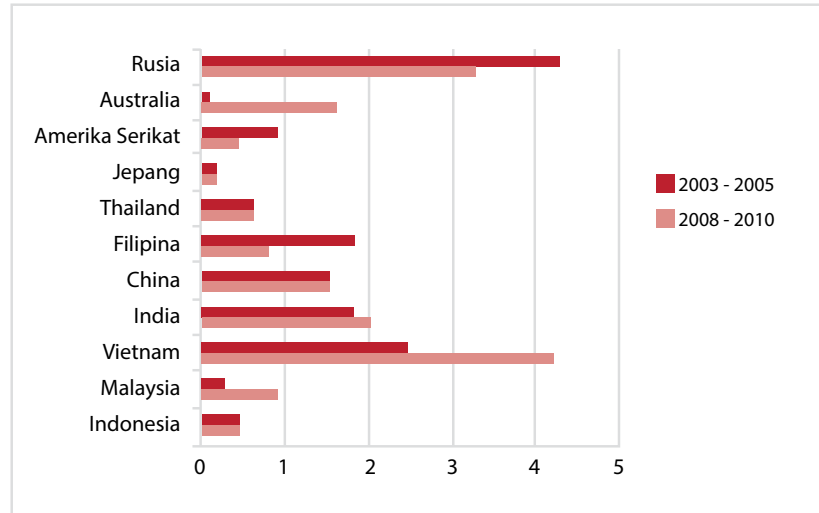
Jumlah konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat tetap stabil di 0.5 liter per kapita antara tahun 2003 dan 2010 (bagan 5).

<sup>20</sup> Menurut WHO “konsumsi minuman beralkohol yang tidak tercatat adalah konsumsi minuman beralkohol yang dibuat rumahan atau yang diproduksi secara informal (baik legal maupun ilegal), minuman beralkohol yang diselundupkan, alkohol yang diperuntukkan bagi penggunaan industri atau medis, dan alkohol yang didapatkan melalui pembelian lintas perbatasan” (unrecorded alcohol consumption includes consumption of home-made or informally produced alcohol (legal or illegal), smuggled alcohol, alcohol intended for industrial or medical uses, and alcohol obtained through cross-border shopping). Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Global Status Report on Alcohol and health 2014, [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/) diunduh pada 29/02/2016 17:08

<sup>21</sup> Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Global Status Report on Alcohol and Health 2014, [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/) diunduh pada 17/06/2016 13:20

### Bagan 5

Konsumsi Minuman beralkohol tidak tercatat pada dua periode (2003 – 05, 2008 – 10)  
(dalam liter per kapita)



Sumber: Organisasi Kesehatan Dunia, 2014<sup>22</sup>

Minuman beralkohol tidak tercatat, bila mengandung metanol yang merupakan etil alkohol yang diproduksi untuk tujuan industri, menimbulkan risiko yang sangat besar terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat. Metanol memiliki bau yang sama dengan etanol yang merupakan etil alkohol yang digunakan untuk minuman beralkohol. Akan tetapi, metanol sangat beracun dan dapat menyebabkan kejang-kejang, kegagalan organ dan kematian.

Metanol dapat ditemukan dalam alkohol palsu dan oplosan apabila penyuling menggantikan etanol dengan metanol yang lebih murah untuk menghemat biaya produksi dan meningkatkan daya memabukkan minuman tersebut. Cairan tersebut dituangkan ke dalam botol minuman beralkohol bermerek ternama dan dijual sebagai minuman beralkohol impor. Minuman beralkohol palsu semacam ini sering dikonsumsi oleh wisatawan asing di Bali dan Lombok yang seringkali tidak menyadari zat-zat berbahaya yang terkandung dalam minuman mereka.

Tragedi semacam itu terjadi saat seorang pemuda Australia tewas akibat keracunan metanol setelah merayakan Tahun Baru 2013 di Lombok. Keluarganya kemudian mendirikan Yayasan Lifesaving Initiatives About Methanol (LIAM) untuk membantu korban lain dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko keracunan metanol di kawasan wisata.<sup>23</sup>

Metanol juga dapat ditemukan dalam alkohol campuran lokal yang dikenal dengan sebutan alkohol oplosan. Nama minuman ini merujuk pada kata dalam bahasa Jawa yang berarti campuran. Minuman ini mungkin tidak menimbulkan risiko bila menggunakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, bila mengandung metanol dan zat-zat lain seperti losion anti nyamuk, cairan baterai dan pil obat sakit kepala, minuman beralkohol oplosan menjadi sangat berbahaya untuk kesehatan. Alkohol oplosan dijual dalam berbagai bentuk dan macam botol dan kaleng bekas.

<sup>22</sup> World Health Organization, *Global Status Report on Alcohol and Health 2014*, [http://www.who.int/substance\\_abuse/publications/global\\_alcohol\\_report/en/](http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/) retrieved on 17/06/2016 13:20

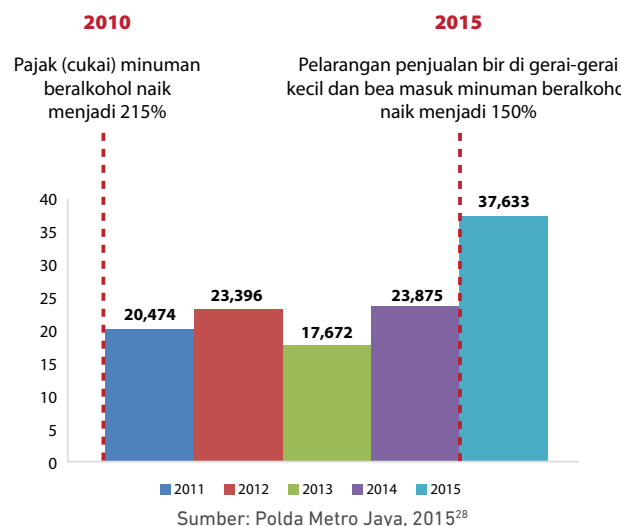
<sup>23</sup> Jumpa Pres Peresmian Yayasan Methanol Institute - LIAM <http://methanol.org/getattachment/0ab7c7a7-5616-402b-a93d-33e262838d00/MI-LIAM-Launch-Press-Release-20140820-EN-ID-vfinal.pdf.aspx> diunduh pada 17/06/2016 22:03

Di Yogyakarta, satu botol minuman beralkohol oplosan ukuran 300 ml dengan kadar alkohol sekitar 40% dapat dibeli dengan mudah seharga Rp30.000,- (sekitar US\$2.26).<sup>24</sup> Sementara itu, satu botol Gordon Dry Gin ukuran 750 ml yang diimpor secara legal dengan kadar alkohol serupa dapat dibeli seharga Rp420.000,- (US\$31.60). Dengan upah minimum kebanyakan masyarakat Yogyakarta sebesar Rp1.108.000,- (US\$83.4)<sup>25</sup> per bulan, minuman beralkohol oplosan menjadi pilihan masyarakat berpenghasilan rendah saat mereka mencari minuman beralkohol.

Harga jual minuman beralkohol juga membantu menjelaskan mengapa konsumen minuman beralkohol di Indonesia lebih memilih minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi saat mereka ingin mabuk-mabukan. Bir yang diproduksi dengan legal dari produsen Indonesia dengan kadar alkohol sebesar 4.7% dijual seharga Rp18.000,- (US\$1.35) sedangkan satu botol minuman beralkohol oplosan dengan harga jual yang berbeda tipis memiliki efek memabukkan yang jauh lebih kuat.

Tidak hanya disebabkan oleh harga yang terjangkau, ketersediaan produk-produk alkohol palsu dan oplosan<sup>26</sup> juga menjadikan produk-produk tersebut menjadi pilihan bagi konsumen minuman beralkohol di Indonesia. Polda Metro Jaya menyadari adanya peningkatan tajam dalam jumlah penjualan minuman beralkohol palsu di Jakarta, terutama setelah pemerintah menerapkan larangan penjualan bir dan anggur fermentasi di toko-toko kecil pada tahun 2015. Mereka menyita 37.633 botol minuman beralkohol palsu pada tahun 2015, sedangkan pada tahun 2014 mereka hanya menyita 23.875 botol (lihat Bagan 6).<sup>27</sup> Peningkatan sebesar hampir 58% dari tahun 2014 ke tahun 2015 ini memberikan indikasi bahwa pembatasan perdagangan justru menyebabkan tingginya permintaan minuman beralkohol palsu untuk menggantikan minuman beralkohol yang diperjualbelikan dengan legal di Jakarta.

**Bagan 6**  
Minuman beralkohol palsu yang disita oleh Polda Metro Jaya (2011 – 15)



<sup>24</sup> Bambang Muryanto, *Yogyakarta Moonshine Traders Have Powerful Friends* <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/13/yogyakarta-moonshine-traders-have-powerful-friends.html> 17/06/2016 22:05

<sup>25</sup> WageIndicator.org, *Minimum Wage in Indonesia* <http://www.wageindicator.org/main/salary/minimum-wage/indonesia>

<sup>26</sup> Media di Indonesia biasanya tidak membedakan antara berbagai jenis minuman beralkohol yang tidak tercatat dan menggunakan istilah minuman beralkohol palsu dan selundupan, oplosan, dan *moonshine* secara bergantian.

<sup>27</sup> Data dari Polda Metro Jaya yang dipresentasikan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri di Rapat Dengar Pendapat mengenai RUU larangan minuman beralkohol di Dewan Perwakilan Rakyat, 3 Februari 2016.

<sup>28</sup> Ibid.

Alkohol palsu dan oplosan menyebabkan masalah kesehatan berat, seperti cedera dan kematian di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 2016, 26 orang tewas di Yogyakarta dan 17 orang cedera, yang sebagian besar merupakan mahasiswa. Setelah kejadian tersebut, polisi lokal menyita satu galon minuman beralkohol palsu buatan lokal yang mengandung bahan-bahan kimia yang tidak bisa diidentifikasi.<sup>29</sup>

Jumlah keseluruhan korban sulit diketahui dengan pasti karena banyaknya kasus yang tidak dilaporkan oleh keluarga korban yang menganggap peristiwa tersebut sebagai aib keluarga. Lembaga kesehatan negara dan kepolisian juga tidak memiliki basis data nasional yang bisa diakses secara lengkap. Walaupun begitu, pencarian sederhana di dalam laporan media massa telah memberikan indikasi tentang beratnya masalah ini (lihat tabel 2).

**Table 2**  
Korban akibat alkohol palsu dan oplosan

Tahun	Korban Tewas	Korban Cedera
2013	83	20
2014	151	199
2015	126	102
2016	59 <sup>30</sup>	27

Sumber: Disusun dari pemberitaan media daring<sup>31</sup>

## 5 Kesimpulan

Pemerintah Indonesia cenderung menekan risiko konsumsi minuman beralkohol dengan peraturan yang beragam, mulai dari menaikkan harga jual melalui pajak bea dan cukai hingga melarang penjualan minuman beralkohol di toko-toko kecil. Beberapa daerah juga telah menerapkan rezim pelarangan minuman beralkohol. Akan tetapi, tidak ada data statistik yang jelas yang dapat mengukur besarnya permasalahan konsumsi minuman beralkohol. Pihak kepolisian pun tidak dapat mengatakan dengan pasti berapa banyak jumlah kasus kematian, kekerasan, dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat terpengaruh minuman beralkohol. Tidak ada data statistik yang menunjukkan bahwa konsumsi alkohol merupakan perhatian serius bagi penyedia layanan kesehatan. Sebaliknya, dengan mengamati angka-angka yang dihadirkan melalui data WHO, tingkat konsumsi minuman beralkohol di Indonesia masih rendah dan hal ini menyebabkan timbulnya keraguan mengenai besarnya masalah ini.

Apabila pemerintah masih ingin menyelesaikan masalah konsumsi minuman beralkohol di Indonesia, kebijakan berdasarkan bukti (evidence-based policy) dan tepat sasaran tidak mungkin diformulasikan tanpa estimasi permasalahan yang baik. Niat baik saja tidak akan menghadirkan hasil yang baik, terutama saat niat ini justru membuat konsumen minuman beralkohol Indonesia beralih ke jenis minuman yang jauh lebih berbahaya dan berpotensi menyebabkan cedera dan kematian yang serius. Jumlah minuman beralkohol palsu yang disita di Jakarta akhir-akhir ini tampak mengindikasikan bahwa kecenderungan tersebut memang terbukti. Saat konsumen

<sup>29</sup> Jakarta Post, *Yogyakarta Oplosan Death Toll Rises*, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/02/08/yogyakarta-oplosan-death-toll-rises-again.html> diunduh pada 29/02/2016 11:21

<sup>30</sup> Sampai Maret 2016

<sup>31</sup> Data dikumpulkan dari 20 portal berita daring nasional dan daerah dan diverifikasi melalui proses pemeriksaan berbagai sumber untuk memastikan benar-benar insiden yang dikutip.

minuman beralkohol di Indonesia mengonsumsi minuman tidak tercatat lima kali lebih banyak dari minuman beralkohol legal, pemerintah sepatutnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkan tingkat konsumsi minuman beralkohol legal. Sebaliknya, pemerintah seharusnya lebih menekankan upaya mengurangi produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol palsu dan oplosan.

Dengan sejarah konsumsi minuman beralkohol tidak tercatat yang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan minuman beralkohol tercatat, dapat diasumsikan bahwa konsumen minuman beralkohol tidak tercatat akan tetap mengonsumsi dan bahkan meningkatkan jumlah konsumsi minuman beralkohol mereka apabila pemerintah menerapkan larangan terhadap semua minuman beralkohol legal. Larangan tersebut akan menciptakan peluang bagi sindikat kriminal untuk mendistribusikan minuman beralkohol terlarang melalui sistem distribusi pasar gelap. Kejadian yang sama pun terjadi di Amerika Serikat saat minuman beralkohol dilarang pada tahun 1920 hingga 1933. Pelarangan ini justru menyebabkan meningkatnya minuman beralkohol palsu yang mengandung zat-zat yang berbahaya dan mematikan.<sup>32</sup>

Pelarangan narkoba secara umum mengikuti "*Iron Law of Prohibition*" yang diformulasikan oleh Richard Cowan: "*the harder the enforcement, the harder the drugs*" (semakin keras penegakkan, semakin keras narkobanya).<sup>33</sup> Saat narkoba dilarang, potensi dari peredaran narkoba tersebut justru meningkat. Hal ini terjadi karena banyaknya orang yang kemudian beralih ke narkoba yang dosisnya lebih kecil namun dengan efek yang jauh lebih kuat untuk mengurangi risiko tertangkap tangan membawa narkoba dan terkena hukuman. Penjual ilegal juga mengamini preferensi ini karena minuman beralkohol dengan kadar alkohol tinggi tidak memerlukan botol besar, lebih ringan, dan memiliki harga jual yang lebih tinggi.

Sebagai penutup, RUU Larangan Minuman Beralkohol ini berencana memberikan pengecualian untuk lokasi-lokasi wisata, hotel, dan restoran mewah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak merugikan RUU ini terhadap industri pariwisata. Akan tetapi, pada saat yang sama, pengecualian ini justru memberikan peluang bagi masyarakat kelas atas Indonesia untuk tetap mengonsumsi minuman beralkohol secara legal sedangkan masyarakat kelas menengah ke bawah tidak memiliki pilihan lain karena mereka tidak mampu membeli minuman beralkohol dari hotel dan restoran mewah. Mereka akan terpaksa beralih ke minuman beralkohol palsu dan oplosan.

<sup>32</sup> Mark Thornton, *Alcohol Prohibition Was a Failure*, Cato Institute Policy Analysis No. 157 <http://www.cato.org/publications/policy-analysis/alcohol-prohibition-was-failure> diunduh pada 29/02/2016 17:22

<sup>33</sup> Richard Cowan, *How the Narcs Created Crack: A War Against Ourselves*. *National Review* 38, 5 Desember, 1986 (23): 26–34.





## TENTANG PENULIS

Rofi Uddarojat adalah peneliti kebijakan publik Center for Indonesian Policy Studies. Area penelitiannya meliputi isu-isu kebijakan tentang buruh migran dan konsumsi alkohol di Indonesia. Dia telah menyelesaikan beberapa riset tentang perbaikan rekrutmen TKI, dampak aktivitas migrasi, dan konsekuensi dari pelarangan alkohol. Rofi juga merupakan editor dari website SuaraKebebasan.org dan telah melakukan aktivitas pengenalan dan pembentukan jejaring pemuda untuk ide-ide ekonomi pasar. Rofi meraih gelar sarjana ilmu sosial dari Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Paramadina, Jakarta.

## TENTANG CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non-profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisis kami.

### AREA FOKUS UTAMA:

**Perdagangan dan Kesejahteraan:** CIPS menemukan adanya kerugian yang diakibatkan oleh pembatasan ekonomi, dan merumuskan pilihan kebijakan yang memungkinkan masyarakat Indonesia untuk hidup sejahtera dan mampu menjaga kelestarian lingkungan.

**Sekolah Swasta Murah:** CIPS mengkaji situasi sekolah swasta murah dan bagaimana mereka berkontribusi dalam penyediaan pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah di Indonesia.

**Migrasi Buruh Internasional:** CIPS merekomendasikan kebijakan yang memfasilitasi migrasi buruh berkemampuan rendah karena keberadaan mereka sangat penting sebagai sumber pendapatan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia.

[www.cips-indonesia.org](http://www.cips-indonesia.org)

 [facebook.com/cips.indonesia](https://facebook.com/cips.indonesia)

 [@cips\\_indonesia](https://twitter.com/cips_indonesia)

Grand Wijaya Center Blok G8  
Jalan Wijaya II  
Jakarta Selatan, 12160  
Indonesia  
Tel: +62 21 27515135